

PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

Andi Sari Ayu Juniarti S.^{1*}, Muhammad Yamin², Masyhuri³

Institut Agama Islam Negeri Bone¹²³, Watampone, Indonesia

andisariayu1234@gmail.com^{1*}, husfahmaipal@gmail.com², masyhuri@iain-bone.ac.id³

Informasi	Abstract
Volume : 2	<p><i>The purpose of this study was to determine the effect of the Application of Government Accounting Standards on the Quality of Financial Statements. This type of research is quantitative research with data collection through questionnaires, samples were taken 36 respondents with simple linear regression test techniques. This study uses primary data obtained from respondents' answers in the form of filling out questionnaires, namely data obtained directly from the object of research. The results of research that has been conducted related to the effect of the effectiveness of the application of government accounting standards on the quality of government financial reports show that the significance test also shows that the t value (3.946) is greater than the t table value (2.032) and the significance value (0.000) is smaller than 0.05. Therefore, the variable effectiveness of the application of government accounting standards on the quality of government financial statements has a positive and significant effect on the quality of government financial statements. Based on the results of the coefficient of determination (R-Square) obtained of 0.314 or 31.4%, thus it can be said that the effect of the effectiveness of the application of government accounting standards on the quality of financial statements is 31.4%, which means that it is very influential.</i></p>
Nomor : 5	
Bulan : Mei	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	
<p>Keywords : Accounting Standards, Governance, Financial Reporting</p>	
<p>Abstrak</p> <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner, sampel diambil 36 orang responden dengan teknik uji regresi linear sederhana. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari jawaban responden yang berupa pengisian kuesioner yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Alat yang digunakan untuk menganalisis data yaitu IBM SPSS Statistic 22 dan 26, Hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa Uji signifikansi juga menunjukkan bahwa nilai t hitung (3,946) lebih besar dari nilai t tabel (2,032) dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,05. Karena itu, variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R-Square) yang diperoleh sebesar 0,314 atau 31,4%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh</p>	

efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan adalah 31,4% yang artinya sangat berpengaruh.

Kata Kunci : *Standar Akuntansi, Pemerintahan, Laporan Keuangan*

A. PENDAHULUAN

Sejalan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah, maka lembaga negara wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari akuntabilitas, perlu diterapkan sistem pelaporan keuangan terukur yang mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perlu pula adanya pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang akuntansi pemerintahan agar terbentuk sistem yang tepat (Wibisono, 2024).

Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat diharapkan membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Dalam hal desentralisasi keuangan dan otonomi daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pemerintah telah mengeluarkan suatu paket kebijakan tentang pengelolaan keuangan negara yaitu Penetapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Kusmila & IrmaRosi, 2023). Selain itu, terdapat undang-undang nomor 12 tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berbagai peraturan serta perundang-undangan tentang pengelolaan

keuangan telah disusun guna dijadikan sebagai landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan negara dalam rangka menjadikan *good governance* dan *clean government*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan ini mencakup prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan oleh entitas pemerintahan di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2022, ada perubahan terbaru yang mengarah pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 179/PMK.05/2022 yang menjadi acuan dalam hal pelaporan keuangan bagi pemerintah pusat dan daerah. Regulasi ini berisi tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan sendiri merupakan ringkasan dari transaksi keuangan entitas yang digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi bagi para pengguna (Latifah et al., 2022).

Pada tahun 2022, terdapat dua Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang baru berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2022. Kedua PSAP baru ini diterbitkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dan memberikan informasi yang lebih relevan dan andal bagi para pengguna laporan keuangan. PSAP 16 memberikan kejelasan mengenai perlakuan akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa yang semakin umum terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya standar ini, diharapkan pemerintah dapat menyajikan informasi yang lebih transparan dan akuntabel mengenai aset dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian konsesi jasa. Sementara itu, PSAP 17 mengatur tentang properti investasi yang dimiliki oleh pemerintah. Properti investasi merupakan aset yang signifikan bagi pemerintah daerah, sehingga pengaturan yang jelas dan komprehensif diperlukan. PSAP ini memberikan panduan mengenai bagaimana pemerintah harus memperlakukan properti investasi dalam laporan keuangannya, termasuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang terkait.

Dengan adanya standar ini, diharapkan laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan komparatif mengenai nilai dan kinerja properti investasi yang dimiliki. Penerapan kedua PSAP ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah secara keseluruhan. Laporan keuangan yang berkualitas akan membantu para pengguna laporan keuangan, seperti masyarakat, investor, dan pihak-pihak terkait lainnya, dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan pengelolaan keuangan negara.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah diselesaikan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) pada tahun 2010, dan kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010. Menurut peraturan tersebut, laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah harus secara bertahap menggunakan akuntansi berbasis akrual. Seluruh laporan keuangan pemerintah daerah harus menggunakan SAP berbasis akrual paling lambat tahun 2015. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan yang digunakan untuk menunjukkan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, LKPD harus menggunakan SAP. Tujuan dari penggunaan SAP adalah untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah lebih transparan dan lebih baik. Menurut laporan keuangan yang berkualitas, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab atas wewenang yang diberikan (Aprsiansyah et al., 2020).

Pihak-pihak yang berkepentingan akan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah untuk membuat keputusan. Komponen yang dikirim termasuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Laporan Keuangan Menurut PP No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan opini yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas laporan. Setelah BPK memberikan opininya, laporan tersebut akan diproses lebih lanjut. Menurut Tanjung (2008), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, uang diberikan kepada pemerintah, DPR/DPRD, investor, kreditor, dan masyarakat umum. Dalam hal ini, BPK dapat memberikan empat jenis opini: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*). Memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat pada PP No. 71 Tahun 2010 (Launtu, 2021).

Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka informasi dalam laporan keuangan harus mempunyai karakteristik kualitatif meliputi relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Khusus untuk karakteristik kualitatif relevan, sebuah informasi dalam laporan keuangan pemerintah dinyatakan memiliki nilai relevan jika informasi tersebut memenuhi empat kriteria, yang terdiri dari nilai umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu (*timelines*) dan lengkap (*completeness*).

Fikri Ary Nugraha (2022) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan" Hasil penelitiannya menunjukkan sebuah studi yang dilakukan di BPKAD Kabupaten Sidoarjo bahwa pemahaman terhadap SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis menggunakan *Partial Least Square* (PLS).

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti, Penelitian terdahulu menekankan pada pemahaman terhadap standar akuntansi sebagai faktor yang memengaruhi kualitas laporan, sementara penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas penerapan standar tersebut dalam konteks spesifik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. Selain itu, lokasi penelitian dan sampel yang digunakan juga berbeda, di mana peneliti terdahulu melakukan penelitian di BPKAD Kabupaten Sidoarjo dengan 53 responden, sedangkan penelitian ini akan melibatkan responden dari instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah, menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Rachmat, adalah untuk menyajikan informasi tentang laporan realisasi anggaran, posisi keuangan, arus kas, dan catatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini mencakup semua pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas entitas pelaporan. Untuk mencapai tujuan ini, informasi dalam laporan keuangan harus memiliki ciri-ciri kualitatif seperti relevan, kredibel, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. Masalah yang mendasari penelitian ini adalah apakah penerapan SAP secara efektif telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan yang

baik menjadi krusial karena menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat oleh para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, DPRD, investor, dan masyarakat (Asmadia & Novebriana, 2021).

Terdapat beberapa potensi masalah yang mungkin timbul terkait dengan efektivitas penerapan SAP. Pertama, pemahaman dan interpretasi yang berbeda terhadap standar akuntansi dapat menghambat penerapan yang konsisten. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan juga dapat menjadi kendala. Ketiga, sistem dan prosedur yang belum memadai dapat menghambat penerapan SAP secara efektif. Keempat, kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan SAP dapat mengurangi efektivitasnya (Iwanda, 2024). Penelitian ini akan menguji hipotesis bahwa efektivitas penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, semakin efektif penerapan SAP, semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini akan diukur berdasarkan beberapa dimensi, seperti relevansi, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei dengan membagikan kuesioner kepada responden di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. Populasi penelitian adalah 36 karyawan yang bertanggung jawab atas keuangan di masing-masing satuan kerja, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh yang melibatkan seluruh populasi (Sulistiyowati & Astuti, 2017). Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, didorong oleh kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel bebas berupa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X) yang diukur melalui indikator basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi internal, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. Sedangkan variabel terikat adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y) yang diukur melalui indikator relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan kuesioner, dengan data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner menggunakan google form oleh responden, sementara data sekunder berasal dari literatur pendukung seperti jurnal dan buku. Kuesioner menggunakan Skala Likert satu sampai lima untuk mengukur tanggapan responden terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk kedua variabel penelitian (Nafisatur, 2024).

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear sederhana dengan formula $Y = a + bX$, di mana Y adalah kualitas laporan keuangan pemerintah dan X adalah penerapan SAP. Sebelum dilakukan analisis, dilakukan uji kualitas data yang meliputi uji validitas menggunakan Analisis Faktor Konfirmatori dengan nilai KMO MSA yang dikehendaki harus > 0,60, dan uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dengan nilai koefisien yang harus lebih besar dari 0,6.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk melihat pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat, dengan kriteria pengujian jika nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selain itu, digunakan juga koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kontribusi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 26 untuk memperoleh hasil yang akurat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Validitas

a. Hasil Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Item	Nilai R-hitung	Keterangan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	X1	0,783	Valid
	X2	0,752	Valid
	X3	0,707	Valid
	X4	0,749	Valid
	X5	0,645	Valid
	X6	0,281	Tidak Valid
	X7	0,695	Valid
	X8	0,435	Valid
	X9	0,390	Valid
Kualitas Laporan Keuangan	Y1	0,683	Valid
	Y2	0,561	Valid
	Y3	0,666	Valid

Y4	0,752	Valid
Y5	0,633	Valid
Y6	0,574	Valid
Y7	0,720	Valid
Y8	0,603	Valid

Sumber: Data Primer (Kuesioner) Diolah, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel X pertanyaan no.1 sampai 9 dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel (0,320) kecuali pertanyaan no.6 tidak valid (0,281) karena lebih kecil dari 0,320. Sedangkan variabel Y pertanyaan no.1 sampai 8 dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel (0,320).

b. Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan		
Akuntansi	0,799	Reliabel
Kualitas laporan keuangan	0,805	Reliabel

Sumber: Data Primer (Kuesioner) Diolah, Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengujian diatas, diketahui angka alpha dari variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah 0,799 dan angka dari variabel Kualitas Laporan Keuangan adalah 0,805 jadi angka tersebut (0.799 dan 0,805) lebih besar dari minimal alpha 0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan dapat dikatakan Reliabel .

2. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji T

Tabel 3. Uji T Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.952	4.626		3.881	.000
	Penerapan Standar Akuntansi	.451	.114	.560	3.946	.000

Pemerintahan					
--------------	--	--	--	--	--

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

Sumber: Data Primer (Kuesioner) Diolah, Tahun 2025

Untuk mengukur pengaruh variabel dependen terhadap independen, nilai t hitung dibandingkan dengan t tabel. Apabila nilai signifikan minus dari 0,05 atau jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat diketahui ada pengaruh signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai t hitung sebesar 3,946 dan untuk t tabel sebesar 2,032.

Untuk mendapatkan t tabel digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai alpha (a) / 2} = 0,05 / 2 = 0,25$$

$$\text{Derajat kebebasan (df) = n - k} = 36 - 2 = 34$$

Nilai 0,25 ; 34 kemudian kita lihat pada distribusi nilai t tabel, maka didapat nilai t tabel sebesar 2,032

Keterangan:

Df = degree of freedom

n = jumlah responden, observasi, atau data

k = jumlah variabel penelitian

Karena nilai t hitung sebesar 3,946 lebih besar dari t tabel sebesar 2,032, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Yang menunjukkan ada pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4. Hasil Uji Determinasi R² Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.560 ^a	.314	.294	2.35242

a. Predictors: (Constant), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Sumber: Data Primer (Kuesioner) Diolah, Tahun 2025

R-square menggambarkan seberapa besar variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan dependennya. Pada gambar diatas terlihat besarnya R square untuk Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan adalah sebesar 0.314 atau 31,4%. dengan demikian dapat dikatan

bahwa pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan adalah 31,4% yang artinya sangat berpengaruh. Sedangkan sisanya (68,6%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

3. Hasil Uji Regresi Sederhana

Tabel 5. Uji Regresi Sederhana Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17.952	4.626		3.881	.000
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	.451	.114	.560	3.946	.000

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

Sumber: Data Primer (Kuesioner) Diolah, Tahun 2025

Dari hasil regresi yang diperoleh Maka dapat dibuat persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = 17.952 + 0,451 X$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta (a) sebesar 17.952 yang berarti bahwa jika kualitas laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh variable penerapan standar akuntansi pemerintahan, maka besarnya variable kualitas laporan keuangan sebesar 17.952.
- b. Koefisien regresi kualitas laporan keuangan bernilai positif sebesar 0,451 hal ini menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

4. Pembahasan

Efektivitas penerapan SAP memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin efektif penerapan SAP, semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Temuan ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya penerapan standar akuntansi yang baik untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Efektivitas penerapan SAP diukur melalui beberapa indikator, antara lain basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip

penyajian wajar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi positif terhadap penerapan SAP di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. Hal ini tercermin dari jawaban responden yang didominasi oleh pilihan "Setuju" dan "Sangat Setuju" terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara komprehensif memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Variabel Penerapan SAP yang mencakup prinsip-prinsip fundamental seperti basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar, secara kolektif membentuk kerangka kerja yang kuat untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipahami. Basis akuntansi akrual, yang menjadi landasan utama dalam SAP, memastikan bahwa pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan hanya saat kas diterima atau dibayar. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja keuangan dan posisi keuangan pemerintah selama suatu periode, terlepas dari waktu aliran kas. Prinsip nilai historis memberikan kepastian dan objektivitas dalam pencatatan aset, sementara prinsip realisasi mengatur pengakuan pendapatan ketika barang atau jasa telah diserahkan dan manfaat ekonomi kemungkinan besar akan diperoleh.

Prinsip substansi mengungguli bentuk formal menekankan bahwa transaksi dicatat sesuai dengan esensi ekonominya, bukan sekadar mengikuti aspek legalnya, sehingga menyajikan informasi yang lebih jujur dan relevan. Prinsip periodisitas mewajibkan pelaporan kinerja keuangan dalam periode waktu tertentu, memungkinkan evaluasi kinerja secara berkala dan perbandingan antar periode. Konsistensi dalam penerapan metode akuntansi dari periode ke periode dan antar entitas pemerintah meningkatkan keterbandingan laporan keuangan, memudahkan analisis tren dan pengambilan keputusan. Prinsip pengungkapan lengkap memastikan bahwa semua informasi yang material dan relevan untuk pengambilan keputusan disajikan dalam laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang memberikan penjelasan tambahan.

Penerapan prinsip-prinsip ini sebagaimana diatur dalam SAP berkontribusi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Basis akrual memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kinerja keuangan, prinsip nilai historis dan realisasi meningkatkan keandalan dan objektivitas, sementara prinsip substansi mengungguli bentuk formal memastikan relevansi informasi. Periodisitas dan konsistensi memfasilitasi analisis

dan perbandingan, pengungkapan lengkap meningkatkan pemahaman, dan prinsip penyajian wajar memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara jujur dan tidak menyesatkan.

Kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini diukur berdasarkan empat dimensi, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Relevansi mengacu pada kemampuan informasi dalam laporan keuangan untuk membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh para penggunanya. Informasi yang relevan memiliki nilai prediktif, yang berarti dapat membantu pengguna memprediksi hasil di masa depan, dan nilai umpan balik, yang berarti dapat membantu pengguna mengkonfirmasi atau mengoreksi ekspektasi sebelumnya.

Keandalan dalam konteks laporan keuangan yang dipengaruhi oleh efektivitas penerapan SAP berarti bahwa informasi yang disajikan bebas dari kesalahan material dan menyajikan fakta secara jujur. Laporan keuangan yang andal dapat diverifikasi, yang berarti pihak independen dapat mencapai kesimpulan yang sama mengenai informasi tersebut. Selain itu, informasi harus netral, bebas dari bias yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atau hasil tertentu. Aspek dapat dibandingkan dalam kualitas laporan keuangan, yang dipengaruhi oleh efektivitas penerapan SAP, mengacu pada kemampuan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan serta perbedaan antara laporan keuangan entitas yang berbeda dan laporan keuangan entitas yang sama dari waktu ke waktu. Penerapan SAP yang konsisten dan efektif di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone memungkinkan perbandingan kinerja keuangan antar periode pelaporan, sehingga tren dan pola keuangan dapat diidentifikasi.

Kualitas laporan keuangan juga ditentukan oleh kemampuannya untuk dipahami oleh para penggunanya. Efektivitas penerapan SAP berkontribusi pada aspek ini dengan menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan format pelaporan yang jelas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, melalui penerapan SAP yang efektif disajikan dengan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan ekonomi dan akuntansi pemerintah.

Penerapan SAP yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan dalam keempat dimensi tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan dianggap lebih relevan karena menyajikan informasi yang tepat waktu dan lengkap, andal karena bebas dari kesalahan material, dapat dibandingkan karena konsisten antar periode, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki korelasi positif yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah, terutama jika ditinjau melalui lensa karakteristik kualitatif informasi keuangan yang meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. SAP dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan. Relevansi dicapai melalui kemampuan informasi untuk membuat perbedaan dalam keputusan pengguna, baik melalui nilai prediktif (membantu memprediksi hasil di masa depan) maupun nilai umpan balik (membantu mengonfirmasi atau mengoreksi ekspektasi sebelumnya). SAP mengarahkan penyajian informasi yang tepat waktu dan material, sehingga pengguna dapat memanfaatkan laporan keuangan untuk evaluasi dan perencanaan yang efektif.

Aspek keandalan dalam kualitas laporan keuangan juga sangat dipengaruhi oleh penerapan SAP. Keandalan tercermin dalam informasi yang bebas dari kesalahan material, netral (tidak bias), dan dapat diverifikasi. SAP melalui prinsip-prinsipnya, seperti basis akrual dan pengakuan pendapatan serta beban yang tepat, berkontribusi pada penyajian informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal memastikan bahwa transaksi dicatat sesuai dengan realitas ekonominya, bukan hanya aspek legalnya, sehingga meningkatkan kejujuran penyajian. Selain itu, SAP mendorong adanya dokumentasi yang memadai dan proses akuntansi yang terstruktur, yang mendukung verifikasi informasi keuangan.

Kualitas laporan keuangan juga ditingkatkan melalui karakteristik dapat dibandingkan dan dapat dipahami, yang difasilitasi oleh penerapan SAP. Prinsip konsistensi dalam SAP mengharuskan penggunaan metode akuntansi yang sama dari periode ke periode dan antar entitas, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi tren kinerja dan posisi keuangan serta melakukan perbandingan antar organisasi pemerintah yang sejenis. Lebih lanjut, SAP mengedepankan prinsip pengungkapan lengkap dan penyajian wajar, yang berkontribusi pada keterpahaman informasi. Catatan atas laporan keuangan, yang diamanatkan oleh SAP, menyediakan informasi tambahan yang relevan dan membantu pengguna memahami angka-angka dalam laporan keuangan utama serta membandingkannya dengan periode sebelumnya atau dengan entitas lain.

Secara keseluruhan, penerapan SAP secara efektif dan konsisten memiliki pengaruh positif yang substansial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip dan ketentuan yang diatur dalam SAP, entitas pelaporan pemerintah dapat

menghasilkan laporan keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan, andal karena bebas dari kesalahan material dan bias, dapat dibandingkan antar periode dan entitas, serta dapat dipahami oleh para pengguna. Peningkatan kualitas laporan keuangan ini pada akhirnya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Analisis regresi menunjukkan bahwa variabel efektivitas penerapan SAP memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,451 terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan efektivitas penerapan SAP akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,451 satuan. Uji signifikansi juga menunjukkan bahwa nilai t hitung (3,946) lebih besar dari nilai t tabel (2,032) dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas penerapan SAP secara signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0,314 menunjukkan bahwa efektivitas penerapan SAP mampu menjelaskan variasi kualitas laporan keuangan sebesar 31,4%, sedangkan sisanya (68,6%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Hal ini mengisyaratkan bahwa meskipun efektivitas penerapan SAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, terdapat faktor-faktor lain yang juga berperan penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan, seperti kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan dukungan teknologi informasi.

Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone untuk terus meningkatkan efektivitas penerapan SAP dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan. Peningkatan efektivitas penerapan SAP dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain peningkatan pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan, pembenahan sistem dan prosedur akuntansi, peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan SAP, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saskia Auliah Yusri pada tahun 2024 yang menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis secara umum menyimpulkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Bone. Kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, disarankan untuk tetap mempertahankan penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan baik dan melakukan pengembangan kualitas laporan

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aprsiansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo*.
- Asmadia, T., & Novebriana, I. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Aset Pada KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 17–26.
- Iwanda, A. F. (2024). *Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah*. Universitas Islam Indonesia.
- Kusmila, Z., & IrmaRosi, A. (2023). Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kerinci: Zesmi Kusmila, Adek Irma Rosi. *Jurnal Administrasi Nusantara*, 6(2), 103–111.
- Latifah, E., Masyhuri, R. W. P., Pahlevi, R. W., Mulyani, S., Hasanah, N., Fidiana, F., Zunaidi, A., Nurjanah, N., Yulianti, M. L., & Yunus, A. R. (2022). Manajemen Keuangan Syariah Sebuah Konsep dan Teori. *Purbalingga:: Eureka Media Aksara*.
- Launtu, A. (2021). Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan kualitas sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 18(1), 14–27.
- Nafisatur, M. (2024). Metode pengumpulan data penelitian. *Metod. Pengumpulan Data Penelit*, 3(5), 5423–5443.
- Nugraha, F. A. (2022). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo*. UPN Veteran Jawa Timur.
- Sulistiyowati, W., & Astuti, C. C. (2017). Buku Ajar Statistika Dasar. *Umsida Press*, 1–236.
- Wibisono, A. F. (2024). Efektivitas Pemahaman Standar Akuntansi Sektor Publik terhadap Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten XYZ. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 979–986.